

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Diskripsi Teori**

##### **1. Tinjauan tentang Pendidikan Antikorupsi**

###### **a. Pengertian Pendidikan Antikorupsi**

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Siswoyo dkk. (2007:

18) yang dinamakan pendidikan yaitu:

Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituliskan oleh Siswoyo dkk. (2007: 19) pengertian pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Korupsi menurut Danang (2012: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Chablullah Wibisono (2011: 22) Pengertian korupsi

adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Muhamad Nuh (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif.

Sedangkan menurut Haryono Umar (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) tujuan pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi.

#### b. Penyebab Korupsi

Ada motif dan faktor penyebab terjadinya korupsi seperti yang dikemukakan oleh Caplin (2002) dalam Chabulah (2011: 26-27) bahwa ada dua motif yang mendorong terjadinya korupsi motif tersebut adalah motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang muncul dari dalam diri sendiri bukan dorongan dari luar pribadi tersebut misalnya adalah kepuasan yang akan didapat setelah melakukan korupsi. Sedangkan motif ekstrinsik

adalah motif yang berasal dari luar individu bukan dorongan dari dalam diri individu tersebut, motif ekstern misalnya adalah ajakan, atau paksaan dari pihak lain.

Di samping motif ada juga faktor yang berpengaruh dilakukannya korupsi, faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri individu yaitu misalnya sifat rakus, serakah yang tertanam kuat dalam pribadi individu tersebut. Untuk faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar individu misalnya karena adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, seperti lemahnya penegakkan hukum karena para penegak hukum mudah untuk disuap.

Selain motif dan faktor di atas ada tiga aspek yang menjadi penyebab korupsi menurut buku “Strategi Pemberantasan Korupsi” dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikutip Chabullah (2011: 28-29) yaitu aspek individu pelaku, aspek organisasi, aspek tempat individu dan organisasi berada.

Aspek individu pelaku meliputi sifat tamak, malas, moralitas lemah, gaya hidup yang sehingga banyak kebutuhan yang mendesak sedangkan penghasilan kurang mencukupi dan ajaran agama yang tidak diterapkan. Aspek organisasi meliputi tidak adanya kultur organisasi yang benar ditunjukkan dari sistem akuntabilitas yang kurang memadai di instansi pemerintah, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan manajemen

cenderung menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi namun yang tidak kalah penting adalah kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Aspek yang terakhir yaitu tempat individu dan organisasi berada. Aspek ini meliputi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat ternyata mendorong korupsi semakin subur kemudian kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka terlibat dalam korupsi dan mereka juga yang menjadi korban dari korupsi serta kurang sadarnya masyarakat bahwa bila masyarakat ikut berperan aktif ke arah positif korupsi bisa dicegah dan diberantas.

c. Dampak korupsi

Korupsi menimbulkan banyak dampak ataupun akibat yang sangat merugikan Chabullah (2011: 33-34) menyatakan bahwa ada empat aspek yang akan terpengaruh dari adanya korupsi yaitu aspek ekonomi, birokrasi, hukum serta moral.

Pada aspek ekonomi, korupsi di Indonesia yang sangat tinggi mengakibatkan negara ini menjadi terkenal di negara-negara lain sebagai negara yang tindak koruptifnya tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, para investor asing akan meragukan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Akibat dari hal itu perekonomian Indonesia tidak stabil dan Indonesia mencari pinjaman hutang ke

luar negeri yang akan meningkatkan beban hutang luar negeri Indonesia.

Dalam aspek birokrasi, korupsi akan menyebabkan adanya kesenjangan antara pejabat tinggi dengan pegawai rendahan. Kesenjangan ini dikarenakan para pejabat tinggi bekerja sama dengan pejabat legislatif untuk menentukan pendapatan yang akan diterima untuk kepentingan mereka. Nasib dari pegawai rendahan tidak di pertimbangkan, sehingga kesenjangan yang muncul sangat tinggi. Di sisi lain dengan adanya korupsi proyek-proyek untuk kepentingan umum menjadi terbengkalai. Kualitas fasilitas umum yang rendah misalnya transportasi umum yang belum cukup nyaman, banyak yang rusak walaupun belum lama dibangun serta gedung sekolah yang roboh.

Di aspek hukum, korupsi menyebabkan sistem hukum yang tidak sehat. Akibat dari korupsi hukum yang adil sulit untuk ditegakkan. Misalnya kasus yang dialami oleh nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao, harus diadili hanya karena tiga buah kakao yang harganya tidak lebih banyak dari yang diperoleh koruptor. Apabila dibandingkan dengan koruptor, mereka mudah untuk lolos dari hukuman penjara dengan memberikan suap kepada penegak hukum. Kejadian-kejadian tersebut menunjukan ketimpangan keadilan yang ditegakkan oleh hukum.

Dari aspek moral, korupsi merubah polah pikir masyarakat. Harta yang menjadi sarana hidup sekarang menjadi tujuan hidup. Masyarakat menginginkan harta, jabatan dan hal lainnya secara instan, mudah walaupun harus dengan menipu. Ketulusan hati tanpa pamrih menjadi sangat mahal di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.

d. Urgensi Pendidikan Antikorupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari pasal di atas telah dijelaskan tujuan pendidikan diantaranya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia tujuan tersebut selaras dengan pendidikan antikorupsi yang menginginkan para siswa memiliki kepribadian yang anti terhadap segala bentuk tindak korupstif atas perwujudan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Oleh karena itu

pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah sebagai pelaksana pendidikan.

Pendidikan antikorupsi di sekolah haruslah diorientasikan pada tataran *moral action*. Mendidik anak untuk sampai pada *moral action* tahapannya yang harus dilalui adalah *moral knowing* kemudian *moral feeling* hingga akhirnya sampai pada *moral action*. *Moral knowing* adalah tahapan membuat anak mengetahui mengerti atau memahami mengenai moral. *Moral feeling* tahap untuk membantu anak meresapi pengetahuan moral yang diajarkan dan memiliki kesadaran diri bahwa pengetahuan moral diajarkan tersebut adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat menjadi tindakan nyata. Tindakan tersebut adalah hasil dari dua tahapan sebelumnya. Ketiga tahapan tersebut harus seimbang, agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang optimal. Kemampuan yang berkembang bukan hanya aspek kecerdasan intelektual namun kecerdasan emosional, kecerdasan sosial misalnya senang menolong, kecerdasan spiritual misalnya disiplin dalam beribadah serta kecerdasan kinestetik yaitu kecerdasan menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal. Apabila aspek-aspek kecerdasan tersebut dikembangkan dalam perilaku sehari-hari maka diharapkan akan tertanam jiwa yang siap memerangi korupsi atau

antikorupsi. Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*, maka implementasi pembinaannya perlu ditindaklanjuti dengan membangun ”kantin kejujuran” di sekolah sebagai praktik *moral action* yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi (Kemendiknas, 2011 : 14-15).

Menurut Biyanto (2010) dalam Agus Wibowo (2013: 41-42), ada tiga alasan mengapa implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi penting bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pertama, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberikan segala informasi mengenai korupsi dalam usaha pemberantasan korupsi.

Kedua, Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan massif . Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi.

Ketiga, mayoritas pelaku tindak korupsi rata-rata bergelar sarjana. Maka lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga.



e. Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pengembangan pendidikan antikorupsi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Sehingga nilai-nilai acuan pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Agus Wibowo, 2013: 57).

Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam pendidikan antikorupsi selanjutnya dinamakan nilai acuan. Acuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.1 Nilai Acuan Pendidikan Antikorupsi

<b>PENDIDIKAN ANTIKORUPSI</b>	
<b>DIMENSI DAN INDIKATOR</b>	<b>NILAI ACUAN</b>
<b>1 Politik:</b> a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)	<b>KESETARAAN:</b> kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. <b>KEBERSAMAAN:</b> hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), <b>KOMITMEN:</b> Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. <b>KONSEKUEN:</b> Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan
<b>2 Sosiologi:</b> a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan	<b>KEPEMILIKAN:</b> perihal kepemilikan <b>HEMAT:</b> berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros,

<p>layanan (adil)</p> <p>c. Tidak nepotisme (adil, mandiri)</p> <p>d. Tidak kolusi (jujur, mandiri)</p> <p><b>3 Ekonomi:</b></p> <p>a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras)</p> <p>b. Tidak menyuap (jujur)</p> <p>c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab)</p> <p>d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab)</p> <p><b>4 Hukum:</b></p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin)</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur)</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab)</p>	<p>cermat.</p> <p><b>BIJAKSANA:</b> selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)</p> <p><b>IKHLAS:</b> bersih hati, tulus hati.</p> <p><b>BERBAGI:</b> membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman.</p> <p><b>RAJIN:</b> suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus.</p> <p><b>SPORTIF:</b> bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p><b>TANGGUNG JAWAB:</b> keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p><b>DISIPLIN:</b> tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p><b>JUJUR:</b> lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p><b>SEDERHANA:</b> bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai</p>
--	---

<p>f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli)</p> <p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana)</p> <p>h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)</p>	<p>kebutuhan, dan rendah hati.</p> <p>KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p> <p>MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p> <p>PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</p>
---	--

(Kemendiknas, 2011 : 12-13)

Pengembangan pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi seperti yang tercantum dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2011: 4) mencakup:

1. Penyusunan model integrasi pendidikan antikorupsi pada Standar Isi.
2. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi pada silabus.

3. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Agus Wibowo (2013: 58) menjelaskan Prosedur pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam RPP, di antaranya:

1. Menyisipkan indikator materi pendidikan antikorupsi,
2. Menyisipkan materi pendidikan antikorupsi pada tujuan pembelajaran,
3. Menguraikan indikator materi pendidikan antikorupsi pada materi pembelajaran
4. Merencanakan pemberian materi pendidikan antikorupsi dalam langkah-langkah pembelajaran
5. Menambahkan sumber belajar, dan
6. Menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan antikorupsi dalam penilaian pelajaran.

Contoh integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada RPP Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiiyah (SMP/MTs) dari Kementerian Dinas Pendidikan terdapat pada lampiran.

Selain langkah di atas menurut Agus Wibowo (2013: 58-57), tahapan pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam RPP bisa dilakukan seperti halnya dalam pendidikan karakter yaitu:

1. Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI), untuk menentukan apakah nilai-nilai pendidikan antikorupsi sudah tercakup di dalamnya;
2. Menggunakan nilai-nilai acuan dalam pendidikan antikorupsi yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan;

3. Mencantumkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus;
4. Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP
5. Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan
6. Memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

## **2. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan**

### **a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional).

Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan termasuk cakupan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan

bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (Kemendiknas, 2011: 1-2)

Selain pengertian di atas masih banyak pengertian Pendidikan Kewarganegaraan lain, karena memang pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sangat beragam.

Menurut *National Council of Social Studies* (NCCS) Amerika Serikat yang dalam Cholisin (2000: 1.7). Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses yang akan berpengaruh positif untuk membentuk warga negara dalam peranannya di masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan membantu generasi muda untuk memahami cita-cita nasional, macam-macam hak kemerdekaan warga negara yang di jamin dalam konstitusi.

Dari hasil Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics di Tawangmangu Surakarta Tahun 1972 dalam Cholisin (2000: 1.8). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pengembangan dari Ilmu Kewarganegaraan (Ikn) yang dijadikan program pendidikan bersifat interdisipliner dan bertujuan untuk membina warga negara yang lebih baik dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

Cholisin (2000: 1.8) menuliskan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Nu'man Soemantri (1976) adalah program studi yang materi intinya adalah demokrasi politik untuk melatih berpikir kritis, bersikap dan bertindak demokratis sesuai pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Cholisin berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembinaan peranan warga negara untuk bisa menjadi menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara sebagai aspek pendidikan politik (Cholisin, 2000: 1.9).

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara umum dikatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*) (Azis Wahab dan Sapriya, 2011: 311).

Dimon dan Pflieger dalam Cholisin (2000: 1.15) warga negara yang baik memiliki ciri-ciri setia, pemikir, menerapkan hubungan yang demokratis antar sesama, menjadi individu yang mudah menyesuaikan diri, dan orang yang berpartisipasi aktif. Sedangkan menurut Numan Somantri (2001) dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2011) warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama..., Pancasilais sejati.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Ahmad Sanusi dalam Cholisin (2000: 1.17) diantaranya adalah membina masyarakat menurut syarat-syarat konstitusi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, latihan berdemokrasi dan kepemimpinan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Simorangkir dalam Cholisin (2000: 1.18) yaitu memberikan pengetahuan tentang bangsa dan negara, meningkatkan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab serta mempersiapkan putra-putri bangsa menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

Dijelaskan pula oleh Aziz Wahab dan Sapriya (2011: 315) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada lampiran Permendiknas Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 adalah mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, mengembangkan demokratis dan mengembangkan diri ke arah positif sehingga mampu berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah proses kegiatan untuk menciptakan warga negara yang mau melibatkan diri dan mempunyai keinginan kuat untuk memajukan bangsa ke arah positif berlandaskan kecintaan tanah air sesuai dengan aturan, konstitusi dan ideologi negara.



c. Cakupan Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2011: 329-330) dituliskan cakupan Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam standar isi Pendidikan Kewarganegaraan di Permendiknas Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, cakupan materi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat

madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian Khoirul Annas yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan judul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP 2 Negeri Semarang”

Penelitian ini mengambil latar belakang mengenai kekeliruan upaya pemberantasan korupsi yang terlalu fokus pada upaya menindak koruptor, dan sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan antikorupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penerapan pendidikan antikorupsi.

Hasil yang telah dicapai dalam penelitian Khoirul ini adalah bagaimana implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Semarang, faktor-faktor yang menunjang dan menghambat implementasi tersebut dan bagaimana cara mengatasi kendala pada implementasi tersebut.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah tema yang diambil yaitu mengenai implementasi pendidikan antikorupsi. Khoirul dalam penelitiannya membahas mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 2 Semarang tanpa mengkaitkan dengan kantin kejujuran sebagai laboratorium pendidikan antikorupsi. penelitian yang dilakukan membahas mengenai implementasi pendidikan antikorupsi yang akan dikaitkan dengan kantin kejujuran sebagai laboratorium pendidikan antikorupsi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi, Khoirul meneliti implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 2 Semarang, sementara penulis melakukan penelitian pendidikan antikorupsi pada SMP di Kabupaten Sleman. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada kajian permasalahan, Khoirul meneliti bagaimana implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Semarang tanpa mengkaitkan dengan kantin kejujuran sebagai laboratorium pendidikan antikorupsi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi pendidikan antikorupsi yang berkaitan dengan kantin kejujuran sebagai laboratorium pendidikan antikorupsi (Khoirul Annas. (2011). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Smp Negeri 2 Semarang. Diakses dari <http://annaskhoirul.blogspot.com/2011/02/pendidikan-anti-korupsi-di-smp.html> pada tanggal 23 Januari 2013, Jam 16.50 WIB.).

### C. Kerangka Berpikir

Sesuai model yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada tahun 2011, bahwa pendidikan antikorupsi diintegrasikan melalui pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut sesuai, mengingat dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan bahwa cakupan Pendidikan Kewarganegaraan di antaranya untuk meningkatkan kesadaran, wawasan dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi dan nepotisme.

Ruang lingkup pendidikan antikorupsi dalam model yang dibuat oleh Kemendiknas adalah penyusunan model integrasi pendidikan antikorupsi pada Standar Isi, penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi pada silabus, serta penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*, maka implementasi pembinaannya perlu ditindaklanjuti dengan membangun kantin kejujuran di sekolah. Kantin kejujuran merupakan laboratorium pendidikan antikorupsi yang dapat merefleksikan perilaku/tabiati peserta didik yang ada di suatu sekolah. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kantin kejujuran banyak yang mengalami kerugian.

**D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMP di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMP di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran pada SMP di Kabupaten Sleman?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi melalui kantin kejujuran pada SMP di Kabupaten Sleman?